

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA MANGUNKERTA KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR

M Dzikra Rabbani¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat petani merupakan salah satu upaya pembangunan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri atas aparatur pemerintah desa dan anggota kelompok tani. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah menurut Edi Suharto yang meliputi tiga indikator, yaitu peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Indikator regulator mencakup penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan petani, indikator dinamisator meliputi pembinaan, pendampingan, dan pelatihan kepada kelompok tani, sedangkan indikator fasilitator mencakup penyediaan sarana, prasarana, serta dukungan kebutuhan produksi pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai regulator belum optimal karena pemerintah desa tidak menyusun regulasi khusus terkait pemberdayaan kelompok tani dan hanya merealisasikan kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat. Pada indikator dinamisator, pendampingan dan pelatihan yang diberikan belum merata kepada seluruh kelompok tani sehingga manfaat program belum dirasakan secara menyeluruh. Sementara itu, pada indikator fasilitator, pemerintah desa telah berperan cukup baik melalui penyediaan bibit, pupuk, serta sarana dan prasarana pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pemberdayaan Kelompok Tani, Desa Mangunkerta.

Abstract

Empowering farming is an agricultural development effort aimed at enhancing farmers' capabilities, self-reliance, and welfare. This study aims to analyze the role of the village government in empowering farmer groups in Mangunkerta Village, Cugenang District, Cianjur Regency. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection involved observation, interviews, and documentation, with informants comprising village government officials and farmer

group members. The study utilizes Edi Suharto theory of government roles, which encompasses three indicators: the roles of regulator, dynamizer, and facilitator. The regulator indicator covers the formulation and implementation of farmer empowerment policies; the dynamizer indicator includes guidance, mentoring, and training for farmer groups; and the facilitator indicator encompasses the provision of facilities, infrastructure, and support for agricultural production needs. The results indicate that the village government's role as a regulator has not been optimal, as the government has not formulated specific regulations regarding farmer group empowerment and has merely implemented policies originating from the central government. Regarding the dynamizer indicator, the mentoring and training provided have not reached all farmer groups equally, meaning the program's benefits have not been fully realized across the board. Meanwhile, regarding the facilitator indicator, the village government has performed well by providing seeds, fertilizers, and agricultural facilities and infrastructure that meet the farmers' needs.

Keywords: Government Role, Farmer Group Empowerment, Mangunkerta Village.

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan daya saing warga negaranya. Di era modern yang berkembang pesat saat ini, warga negara dituntut untuk mempersiapkan diri dan mengoptimalkan potensinya. Tanggung jawab ini tidak semata-mata berada di tangan warga negara; melainkan juga merupakan kewajiban utama pemerintah, di tingkat pusat, daerah, dan desa, untuk berpartisipasi dalam membimbing dan mendukung warga dalam mewujudkan kemakmuran bersama. Menurut Taliziduhu Ndraha (2011), fungsi utama pemerintah tidak hanya sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai pelayan, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki serta memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan. Dalam konteks pembangunan pedesaan, program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada sektor pertanian menjadi

salah satu strategi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas petani.

Upaya pengembangan petani dapat dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas dan potensi internal petani sekaligus memperluas akses terhadap sumber daya produktif dan peluang pengembangan usaha tani. Salah satu bentuk pengembangan tersebut dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan pendampingan pertanian. Menurut Mosher (1987), pendidikan dan penyuluhan pertanian merupakan faktor penting dalam pembangunan pertanian karena dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengadopsi inovasi dan teknologi pertanian yang lebih efektif. Namun, rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola usaha tani masih menjadi salah satu kendala utama yang memerlukan keterlibatan aktif pemerintah dalam memberikan pembinaan dan dukungan. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah melalui pembentukan kelompok tani sebagai wadah kerja sama antara petani dan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pertanian (Lasming, 2019).

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur, sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian, terutama di wilayah pedesaan. Selain itu, Kabupaten Cianjur memiliki luas lahan pertanian yang cukup besar dengan luas sawah irigasi teknis mencapai sekitar 50.000 hingga 60.000 hektar. Kondisi tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi pertanian cukup besar adalah Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Desa ini memiliki luas lahan pertanian sekitar 103,3 hektar dan lahan perkebunan sekitar 68,5 hektar dengan frekuensi panen sebanyak dua kali dalam satu tahun. Meskipun memiliki kondisi lahan yang relatif subur, para petani masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana irigasi yang memadai dan ketersediaan pupuk berkualitas dengan

harga yang terjangkau. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan kesejahteraan petani.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator pembangunan masyarakat. Menurut Ndraha (2011), pemerintah memiliki fungsi utama sebagai pelayan, pemberdaya, dan penggerak pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, peran Pemerintah Desa Mangunkerta dalam pemberdayaan kelompok tani masih belum optimal. Sebagai regulator, pemerintah desa belum sepenuhnya mampu memastikan bahwa program bantuan pertanian, seperti bantuan pupuk dan sarana produksi, dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada kelompok tani yang membutuhkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang direncanakan dengan implementasi di lapangan.

Selain itu, peran pemerintah desa sebagai dinamisator juga dinilai belum maksimal karena kegiatan penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan bagi kelompok tani belum dilakukan secara intensif dan merata. Padahal, menurut Adisasmita (2013), keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat sasaran. Kurangnya pelatihan dan transfer pengetahuan kepada petani menyebabkan kemampuan petani dalam mengelola usaha tani masih terbatas sehingga berdampak pada hasil produksi yang belum optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan antara peran ideal pemerintah desa dengan realitas yang terjadi di Desa Mangunkerta. Pemerintah desa belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi pemberdayaan secara efektif, khususnya dalam aspek pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kelompok tani. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana

peran pemerintah desa sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. Subjek penelitian meliputi Kepala Desa Mangunkerta, Sekretaris Desa Mangunkerta, Ketua RW 07 Desa Mangunkerta, Perwakilan Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian Lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi terstruktur, serta dokumentasi berupa arsip resmi, laporan kegiatan, dan data sekunder dari literatur maupun media *daring*. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang mencakup pengumpulan data, *display* data, serta penarikan kesimpulan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.

PEMBAHASAN

Desa Mangunkerta merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar masyarakat Desa Mangunkerta menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian sehingga keberadaan kelompok tani menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung perekonomian masyarakat desa. Desa ini memiliki beberapa kelompok tani yang aktif dalam kegiatan budidaya pertanian, yaitu Kelompok Tani Gintung, Mangun Raharja, Mangun Jaya, dan Bina Alam. Kondisi geografis yang mendukung kegiatan pertanian menjadikan sektor ini sebagai sumber pendapatan utama masyarakat. Namun demikian, petani masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sarana irigasi, akses pupuk berkualitas, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan

dan pendampingan. Oleh karena itu, peran pemerintah desa menjadi sangat penting dalam mendorong pemberdayaan kelompok tani guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat petani.

Peran regulator merupakan fungsi pemerintah dalam menyusun, menetapkan, dan mengimplementasikan aturan atau kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Menurut Edi Suharto, pemerintah sebagai regulator berfungsi menciptakan arah pembangunan melalui regulasi yang mampu memberikan kepastian dan pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas pembangunan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pemerintah Desa Mangunkerta belum memiliki regulasi khusus yang mengatur pemberdayaan kelompok tani. Pemerintah desa lebih berperan sebagai pelaksana kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah daripada sebagai pembentuk kebijakan di tingkat desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi regulator belum berjalan secara optimal. Tidak adanya peraturan desa atau kebijakan lokal yang secara khusus mengatur pemberdayaan kelompok tani menyebabkan pelaksanaan program pertanian cenderung bergantung pada kebijakan eksternal. Akibatnya, pemerintah desa memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan riil masyarakat petani di Desa Mangunkerta. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani belum memahami secara menyeluruh mekanisme maupun regulasi yang berkaitan dengan program pemberdayaan pertanian. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku menunjukkan bahwa proses sosialisasi kebijakan belum berjalan secara efektif. Padahal regulasi yang baik tidak hanya ditandai dengan keberadaan aturan, tetapi juga sejauh mana aturan tersebut diketahui, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat sasaran.

Meskipun demikian, pemerintah desa tetap melakukan berbagai upaya untuk mendukung pemberdayaan petani melalui kerja sama dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan instansi pertanian lainnya. Kerja sama tersebut menjadi bentuk kebijakan operasional yang membantu pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani. Namun, tanpa

didukung regulasi desa yang lebih spesifik, efektivitas program pemberdayaan belum dapat berjalan maksimal. Dengan demikian, indikator regulator menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Mangunkerta masih tergolong kurang optimal karena belum mampu menghasilkan kebijakan lokal yang dapat menjadi pedoman khusus dalam pemberdayaan kelompok tani. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program dan mekanisme pemberdayaan yang ada.

Peran dinamisator merupakan kemampuan pemerintah dalam menggerakkan, memotivasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. Dalam penelitian ini indikator dinamisator terdiri dari empat sub indikator, yaitu sosialisasi, pendampingan, pelatihan, dan kunjungan lapangan. Sosialisasi merupakan langkah awal dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap program pertanian yang dijalankan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mangunkerta bersama Penyuluh Pertanian Lapangan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi secara rutin kepada kelompok tani. Sosialisasi dilakukan menjelang musim tanam dan berkaitan dengan jadwal tanam, penggunaan sarana produksi, serta berbagai program pertanian yang akan dilaksanakan.

Keberhasilan sosialisasi terlihat dari adanya komunikasi yang cukup baik antara pemerintah desa, penyuluh, dan kelompok tani. Melalui kegiatan tersebut petani memperoleh informasi mengenai kegiatan pertanian yang akan dilaksanakan sehingga dapat mempersiapkan kebutuhan produksi dengan lebih baik.

Pendampingan merupakan proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk membantu petani dalam menghadapi berbagai persoalan pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan telah dilakukan oleh pemerintah desa dan PPL, namun pelaksanaannya belum merata kepada seluruh kelompok tani. Beberapa kelompok memperoleh pendampingan secara intensif, sementara kelompok lainnya masih jarang mendapatkan pembinaan. Ketidakmerataan pendampingan ini menyebabkan terjadinya perbedaan kapasitas antar kelompok tani. Kelompok yang mendapatkan pendampingan lebih banyak memiliki

pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dibandingkan kelompok yang jarang memperoleh pembinaan.

Pelatihan merupakan sarana peningkatan kapasitas petani dalam mengelola usaha pertanian secara lebih efektif dan produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan memang telah dilaksanakan, namun belum menjangkau seluruh kelompok tani yang ada di Desa Mangunkerta. Sebagian besar pelatihan hanya difokuskan pada kelompok tertentu sehingga manfaatnya belum dirasakan secara merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan seluruh petani belum sepenuhnya tercapai. Padahal pelatihan memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan petani terkait teknologi pertanian, pengelolaan lahan, penggunaan pupuk, serta strategi peningkatan hasil panen.

Kunjungan lapangan merupakan bentuk keterlibatan langsung pemerintah dan penyuluh dalam memantau kondisi pertanian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ini berjalan sangat baik. Pemerintah desa dan PPL secara rutin melakukan kunjungan lapangan sekitar enam kali dalam satu tahun. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan tanaman, mendengarkan keluhan petani, serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi kelompok tani. Keaktifan pemerintah dan PPL dalam melakukan kunjungan lapangan menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan kelompok tani. Kehadiran pemerintah secara langsung juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan yang dijalankan.

Secara keseluruhan, indikator dinamisator menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek pendampingan dan pelatihan yang belum dilakukan secara merata kepada seluruh kelompok tani. Oleh karena itu, peran dinamisator dapat dikategorikan cukup efektif tetapi belum optimal sepenuhnya.

Peran fasilitator merupakan kemampuan pemerintah dalam menyediakan berbagai sarana, prasarana, dan dukungan yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitasnya. Dalam

penelitian ini indikator fasilitator difokuskan pada penyediaan bibit unggul, pupuk, serta sarana dan prasarana produksi pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mangunkerta telah berupaya memenuhi kebutuhan petani melalui penyediaan berbagai bantuan pertanian. Bantuan yang diberikan meliputi bibit unggul, pupuk, serta sarana produksi lainnya yang dibutuhkan kelompok tani dalam menjalankan aktivitas pertanian. Bantuan tersebut diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat petani sehingga mampu mendukung kelancaran kegiatan produksi pertanian. Selain menyediakan bantuan, pemerintah desa bersama Penyuluh Pertanian Lapangan juga melakukan monitoring terhadap pemanfaatan bantuan tersebut. Monitoring dilakukan agar bantuan yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan program pemberdayaan. Kegiatan monitoring ini menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam memastikan efektivitas program bantuan yang telah disalurkan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan petani, terutama berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur irigasi dan distribusi bantuan tertentu yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan seluruh petani. Namun secara umum masyarakat menilai bahwa pemerintah desa telah cukup baik dalam menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan pertanian. Dengan demikian, indikator fasilitator dapat dikatakan sebagai indikator yang paling berhasil dibandingkan indikator lainnya. Pemerintah Desa Mangunkerta telah mampu menjalankan fungsi fasilitasi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan kelompok tani, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan mendukung proses pemberdayaan masyarakat petani.

Berdasarkan ketiga indikator teori Edi Suharto, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Mangunkerta dalam pemberdayaan kelompok tani belum sepenuhnya optimal. Indikator regulator menunjukkan kelemahan karena belum adanya regulasi desa yang secara khusus mengatur pemberdayaan kelompok tani. Indikator dinamisator menunjukkan hasil cukup baik, terutama pada aspek sosialisasi dan

kunjungan lapangan, namun masih lemah pada aspek pendampingan dan pelatihan yang belum merata. Sementara itu, indikator fasilitator menjadi aspek yang paling berhasil karena pemerintah desa telah mampu menyediakan berbagai bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan petani. Oleh karena itu, peningkatan kualitas regulasi desa serta pemerataan program pendampingan dan pelatihan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan pemberdayaan kelompok tani dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches)* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hardani. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Cv. Pustaka Ilmu Group*.
- Rauf, R., & Maulidah, S. (2005). *Pemerintahan Desa* (Y. Munaf (ed.); Issue 1). ZANAFPA PUBLISHING.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama. Buku ini menjadi rujukan utama teori peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat.
- Sutrisno, E. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suwarto. (2018). *Manajemen Kelompok Tani*. Yogyakarta: Deepublish.
- Widjaja, H. A. W. (2015). *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal dan Artikel

- Al Azis, M. V. N. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2404>
- Andriani, N., & Mashuri. (2023). Peran Pemerintah Desa Terhadap

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 02(01), 110–124.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches)* (4th ed.). SAGE Publications.

Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Publik Administrasi*, 3(1), 32–40.

Laurens, S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Proses Penguatan Kapasitas Petani dalam Tinjauan Masyarakat Pedesaan. *BADATI Ilmu Sosial & Humaniora*, 4(1), 13–19.

<http://ojs.ukim.ac.id/index.php/badati/article/view/558>

Lubis, S. B. (2020). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Kasming. (2019). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Patarai, M. I. (2022). Pemberdayaan Petani Di Desa Mattanete Bua Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. *Pallangga Praja*, 4(1), 33–43.

Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1–9.

Soetarto, Simbolon, B. R., & Zebua, S. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok tani untuk meningkatkan hasil panen padi. *Jurnal Governance Opinion*, 4(1), 150–169.

Taopik, A., Sukmawani, R., & Rini, N. K. (2023). Pemberdayaan Kelompok Tani Padi Sawah (*Oryza sativa* L) di Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 9(1), 802–815.

Widarni, R. T., Handrisal, & Edison. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya*

Kabupaten Bintan. 2017, 327–337.

Windasai, Said, M. M., & Hayat. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). *JIP (Jurnal Inovasi Penelitian)*, 2(3), 797.

Website

Badan Pusat Statistik. (2019). *Kabupaten Luwu Timur*.
<https://luwutimurkab.bps.go.id/>

Regulasi

- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
- Permentan Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
- Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa